

# UNIT PELAKSANA TEKNIS HUMAS

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

### KLIPING

Klasifikasi : Universitas Diponegoro  
Tema : Demokrasi Ala Kampus Dari Mahasiswa ke Senat  
Surat Kabar / Majalah : Kompas

Hari Sabtu , Tanggal 2, Bulan Oktober , Tahun 2010, Halaman A Kolom --

#### Ringkasan :

In the selection of the Dekan of Faculty of Social and Political Sciences entire academic community involved in polls.

#### Catatan :



## JAJAK PENDAPAT DI KAMPUS JADI EMBRIO DEMOKRASI

**Jika suara rakyat diibaratkan sebagai suara Tuhan dalam proses demokrasi di suatu negara, maka di dalam perguruan tinggi suara senat yang berkuasa. Dengan model seperti itu, dapatkah iklim demokrasi berkembang di kampus? Sejumlah universitas negeri mencoba menerapkan demokrasi dalam pemilihan rektor maupun dekan fakultas. Namun, jangan dibayangkan prosesnya seperti dalam pemilihan umum.**

**D**alam pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2010, misalnya, mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi dilibatkan dalam proses pemilihan dekan. Suara mereka ditampung dalam sebuah jajak pendapat yang digunakan untuk menyaring aspirasi sivitas akademiknya. Pemilihan ini diikuti enam calon dekan.

Hanya saja, hasil jajak pendapat tersebut memang bukan menjadi penentu siapa yang berhak menjadi dekan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, pemilihan rektor ataupun dekan diputuskan oleh senat.

Proses pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pun demikian. Pemilihan rektor di UNS untuk periode

2011-2015 menggantikan M Syamsulhadi yang sudah dua kali menjabat rektor, diawali dengan pemilihan raya, di mana segenap sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga dosen memilih calon rektor yang disajikan.

Ketua II Panitia Pemilihan Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan, ada 112 dosen yang memenuhi persyaratan administratif,

ANDRI

yakni minimal lektor kepala dan berpendidikan doktoral. Namun, dari jumlah itu hanya 10 orang yang mendaftar.

Dari hasil pemilihan raya, terpilih sembilan besar yang kemudian akan mengikuti tiga tahap pemilihan oleh senat universitas mulai 7 Oktober mendatang. Di sini, hanya anggota senat universitas yang memiliki suara untuk memilih lima dari sembilan ca-

lon rektor yang kemudian akan diperas lagi menjadi tiga calon rektor. Tiga calon ini akan diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk dipilih satu menjadi rektor.

Berawal dari proses yang demokratis dengan melibatkan semua sivitas akademika yang memiliki hak pilih, tetapi berakhir di senat universitas dengan hanya anggotanya yang memiliki hak suara. Terkesan demokrasi setengah-setengah memang.

"Namun, jajak pendapat itu tetap penting sebagai pembelajaran demokrasi. Aspirasi mahasiswa kan juga dapat didengar kalangan senat untuk menentukan dekan terpilih," ujar pengamat politik dari Undip Susilo Utomo, di Semarang, Jumat (1/10).

Susilo menambahkan, hasil jajak pendapat dapat menjadi semacam pesan kepada senat untuk memerhatikan aspirasi dari bawah. Apalagi, sivitas akademika sebagai pemilih intelektual tentunya memilih figur berdasarkan program yang akan diterapkan di kampus pada masa mendatang.

Ketua Panitia Pemilihan Dekan FISIP Undip Turnomo Rahardjo mengungkapkan, jajak pendapat tersebut memang ditujukan untuk menjangkau aspirasi mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi. Hasil jajak pendapat itu diharapkan dapat menjadi re-

ferensi bagi senat fakultas untuk menentukan dekan terpilih. "Jajak pendapat ini bisa dikatakan sebagai laboratorium untuk berdemokrasi," ucap Turnomo.

Agar para pemilih mendapat pengetahuan lebih soal calon, jajak pendapat didahului dengan adanya debat publik dan sosialisasi program di kampus. Bahkan, beberapa calon menyosialisasikan program melalui selebaran yang dibagikan dan jejaring situs sosial *facebook*.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Undip Ali Purnomo berharap jajak pendapat ini menjadi embrio demokrasi yang sesungguhnya di kampus. Dengan begitu, selain senat, mahasiswa dan elemen kampus lainnya dapat memiliki hak suara untuk menentukan dekan maupun rektor ke depannya.

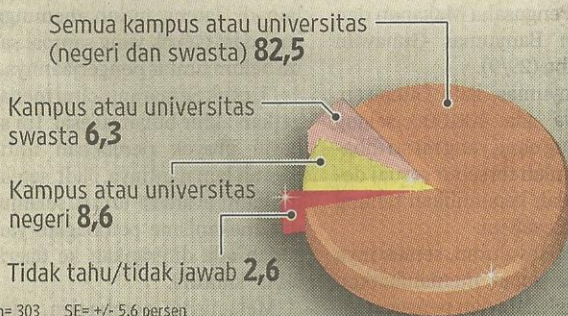
"Setiap program dan kebijakan yang dihasilkan pimpinan justru dirasakan oleh mahasiswa. Wajar saja, jika seharusnya mahasiswa turut punya suara," kata Ali.

(ILO/EKI)

## ◆ Jajak Pendapat

### Publik Dukung Demokrasi ala Kampus

Menurut Anda, proses demokrasi yang melibatkan mahasiswa dalam pemilihan dekan dan rektor sebaiknya dilakukan pada? (persen)



n= 303 SE= +/- 5,6 persen

Sumber: Litbang Kompas

**P**roses pemilihan rektor atau dekan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008. Melalui peraturan ini, lembaga yang berperan besar dalam proses pemilihan adalah senat universitas ataupun senat fakultas.

Lembaga yang terdiri dari unsur guru besar, dosen, staf universitas atau fakultas, alumni, serta mahasiswa itu mengatur mulai dari tata cara pemilihan hingga pengusulan pengangkatan. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin senat juga akan melibatkan seluruh mahasiswa dan segenap sivitas akademika untuk melakukan pemilihan langsung rektor atau dekan. Hal ini bertujuan agar pimpinan terpilih dapat diterima semua kalangan kampus tanpa ada penolakan ataupun demonstrasi.

Pelibatan mahasiswa itu ternyata proses yang diinginkan sebagian besar publik Jawa Tengah. Hasil jajak pendapat *Kompas* mengenai demokrasi kampus menunjukkan, sebesar 87,1 persen responden menyetujui keikutsertaan mahasiswa dalam pemilihan. Dua dari tiga responden yakin proses ini akan menghasilkan pilihan terbaik bagi kampus atau universitas.

Jika pemilihan hanya melibatkan senat, responden menyangsikan proses tersebut bisa menghasilkan pilihan rektor atau dekan yang representatif. Mayoritas responden (82,5 persen) justru menginginkan agar pemilihan pemimpin universitas bisa mencerminkan proses demokrasi yang melibatkan mahasiswa baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

(IWN, Litbang Kompas)  
ANDRI